

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan oleh UMKM sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, UMKM termasuk dalam program pembangunan ekonomi Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Bahkan menurut data UMKM, jumlah UMKM mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2019. Hal ini meningkatkan jumlah tenaga kerja dan PDB harga konstan. Lebih jelas bisa dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah UMKM
di Indonesia dari Tahun 2016-2019

Tahun	UMKM (Unit)	Tenaga Kerja (Jiwa)	PDB harga konstan (Milyar Rupiah)
2016	61.651.177	112.282.610	5.171.063,60
2017	62.922.617	116.431.224	5.445.564,40
2018	64.194.057	116.978.631	5.721.148,10
2019	65.465.497	119.562.843	7.034.146,70

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang ada di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 UMKM berjumlah sebanyak 64.194.057 unit usaha dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65.465.497 unit usaha. Seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja yang diserap juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 berjumlah 116.978.631 jiwa dan tahun sebanyak 119.562.843 jiwa. Peningkatan jumlah UMKM dan tenaga kerja juga meningkatkan PDB harga konstan pada tahun 2018 sebesar 5.721.148,10 milyar rupiah menjadi 7.034.146,70 milyar rupiah tahun 2019.

Akan tetapi, jumlah UMKM yang terus berkembang pesat tidak dibarengi dengan kemampuannya untuk bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang menjadi penghambat pengembangan UMKM yaitu masalah pembiayaan dan minimnya akses pembiayaan. Selain itu, masalah konvensional seperti kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, permodalan atau pembiayaan dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha (Abor & Quartey, 2010). Pernyataan yang sama diungkapkan Agus (2016) masalah yang dihadapi UMKM tidak hanya tentang sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan tetapi juga terkait permasalahan pembiayaan.

Selanjutnya, rendahnya akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan disebabkan persyaratan kredit yang banyak, tingkat suku bunga tinggi, tidak mempunyai tambahan agunan, rendahnya pengetahuan dalam pembukuan dan tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit (Margunani, et. al, 2019). Dapat dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan tingkat inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 sebesar 76,19%. Tingkat inklusi keuangan negara Indonesia masih rendah dibandingkan negara Asean, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 98%, 85% dan 82%. Selanjutnya, berdasarkan data *Global Findex World Bank* (2014) baru sekitar 36% penduduk dewasa di Indonesia yang mengakses kredit ke lembaga keuangan. Didukung dengan data Bank Indonesia tahun 2015 yaitu baru 30% UMKM yang mengakses pembiayaan. Dari presentase tersebut sebanyak 76,1% unit usaha mendapatkan pembiayaan dari bank dan 23,9% unit usaha mengakses dari kredit non bank. Dilansir dari kompas.com 21/04/2021 terdapat 77,6% unit usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga penyalur kredit. Dapat disimpulkan bahwa akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan masih rendah di Indonesia.

Kemudian sulitnya mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dikarenakan lembaga keuangan harus hati-hati dalam memberikan pinjaman karena pihak penyalur kredit tidak mengetahui kondisi UMKM yang sebenarnya dapat dijelaskan melalui laporan keuangan UMKM. Namun, pembuatan laporan keuangan merupakan hal yang sulit bagi UMKM (Rudianto & Siregar, 2012). Untuk itu, diperlukannya literasi keuangan untuk membuat laporan keuangan

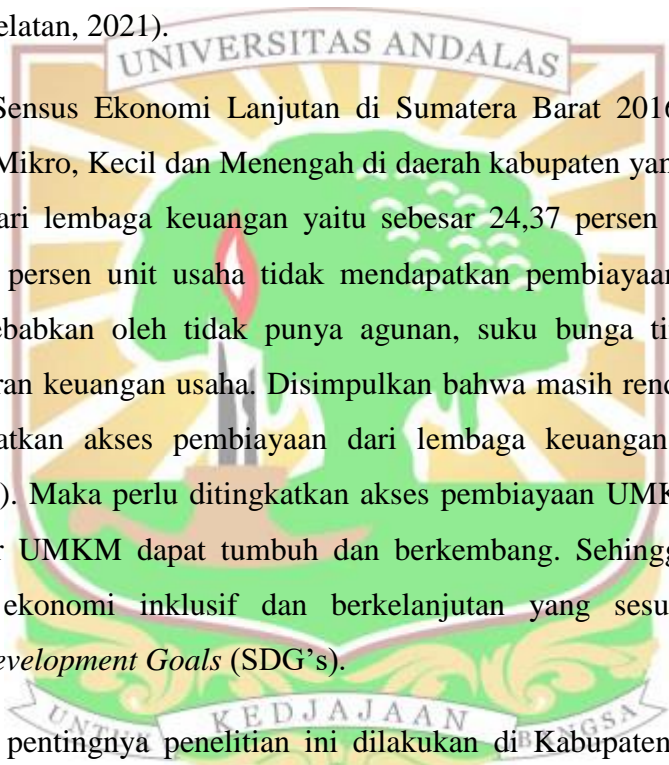
yang akan memudahkan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan (Maisyaroh & Paramita, 2018). Nkundabayanga et. al. (2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya akses pembiayaan adalah literasi keuangan pemilik UMKM.

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa pentingnya literasi keuangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan inklusi keuangan terkait akses pembiayaan ke lembaga keuangan. Dimana apabila UMKM sudah mengetahui dan paham tentang lembaga keuangan, laporan keuangan, sehingga mudah mendapatkan pinjaman atau akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Studi yang dilakukan Oktavianti (2017) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan pada pelaku UMKM. Lusimbo & Muturi (2015) menunjukkan bahwa pemilik UMKM yang mempunyai literasi keuangan rendah berdampak pada minimnya pertumbuhan usaha bahkan menyebabkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan sulit.

Faktor demografi atau karakteristik usaha juga mempengaruhi akses pembiayaan usaha ke lembaga keuangan. Menurut Demirguc-Kunt, et al. (2020) menemukan bahwa jenis kelamin mempengaruhi inklusivitas keuangan. Fungacova dan Weill (2015) mengungkapkan pendidikan juga mempengaruhi inklusivitas keuangan. Sedangkan, Laevan & Woodruff (2007) menemukan bahwa skala usaha atau ukuran usaha berpengaruh terhadap akses keuangan di lembaga keuangan. Nkuah et. al (2013) dan Nguyen dan Luu (2013) juga menemukan bahwa umur pengusaha memiliki hubungan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Zarook, et.all. (2013) mengungkapkan faktor demografi yang terdiri dari usia, klasifikasi usaha dan sektor usaha berpengaruh signifikan terhadap akses keuangan dari lembaga keuangan.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Solok Selatan jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 1.342 unit usaha, pada tahun 2016 berjumlah 3.375 unit usaha, sebanyak 3.927 unit usaha pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 jumlah UMKM sebanyak 3.930 unit usaha, 4.240 unit usaha dan 9.619 unit usaha. Meskipun

jumlah UMKM di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan, namun usaha tersebut tumbuh lambat dalam perkembangan usaha dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sumatera Barat. Dimana jumlah UMKM di kota/kabupaten di Sumatera Barat seperti kota Padang, kota Solok, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Agam sudah mencapai 89.699 unit usaha, 37.115 unit usaha, 45.137 unit usaha, 47.549 unit usaha 45.576, 42.495 unit usaha dan 56.592 unit usaha (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini disebabkan oleh permasalahan terutama pembiayaan dari lembaga pembiayaan (Dinas Koperasi UKM Solok Selatan, 2021).



Hasil Sensus Ekonomi Lanjutan di Sumatera Barat 2016 menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah kabupaten yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yaitu sebesar 24,37 persen unit usaha dan sisanya 75,63 persen unit usaha tidak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan disebabkan oleh tidak punya agunan, suku bunga tinggi dan tidak memiliki laporan keuangan usaha. Disimpulkan bahwa masih rendahnya UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan (Badan Pusat Statistik, 2019). Maka perlu ditingkatkan akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang sesuai tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Kemudian pentingnya penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan karena Solok Selatan memiliki potensi UMKM yang unggul yang dapat dijadikan sebagai primadona dan memiliki nilai tambah yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Solok Selatan. Dengan adanya UMKM jumlah tenaga kerja yang diserap mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 2.261 tenaga kerja, 2017 sebanyak 2.291 tenaga kerja dan tahun 2018 sebanyak 2.378 tenaga kerja (Dokumen Rencana Pembangunan Industri Solok Selatan, 2020).

Dengan banyaknya faktor yang menghambat rendahnya inklusi keuangan terkait akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan, maka perlu di kaji

penelitian ini lebih dalam dengan judul analisis hambatan inklusi keuangan melalui pembiayaan UMKM di Kabupaten Solok Selatan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, UMKM adalah salah satu sektor usaha yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM sulit tumbuh dan berkembang layaknya perusahaan besar. Hal ini disebabkan adanya hambatan dari UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk itu perlu ditingkatkan akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Apa yang menjadi penghambat rendahnya inklusi keuangan terkait akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan di Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana literasi keuangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan?
3. Apakah faktor demografi memiliki hubungan terhadap akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan di Kabupaten Solok selatan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor penghambat rendahnya inklusi keuangan terkait akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui kondisi literasi keuangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan.
3. Menganalisis hubungan faktor demografi terhadap akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan di Kabupaten Solok Selatan.